



3 Pejabat Mengaku Tolak Suap

■ Dugaan Korupsi Retribusi Terminal Manuver Gilimanuk

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Tiga dari empat saksi yang diperiksa menegaskan tidak pernah menerima suap terkait pungutan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk. Saksi yang dihadirkan itu adalah tiga pejabat teras Pemkab Jembrana.

Hal tersebut diungkapkan para saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (14/3). Keempat saksi yang diperiksa adalah pejabat teras yakni kepala dinas (Kadis) Pendapatan Jembrana Dewa Gede Kusuma Antara, Kadis Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana Dwi Maha Arimbawa, bendahara penerima I Wayan Arsana, dan pihak swasta Ketut Astawan.

Saksi yang dihadirkan Jaksa I Made Pasek Budiawan dkk, diperiksa keterangannya untuk terdakwa Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi (53) serta Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk yang juga Pembantu Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Kominfo Jembrana, I Nengah Darna (55).

Di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila,



TRIBUN BALI/PUTU CANDRA

BERIKAN KETERANGAN - Empat saksi memberikan keterangan, Rabu (14/3) di Pengadilan Tipikor Denpasar.

saksi Dewa Gede Kusuma menjelaskan, pungutan retribusi Terminal harus disetorkan ke kas daerah. Setoran dan pelaporan yang dibuat Dinas Perhubungan terkait pungutan retribusi itu berjalan lancar. Namun uang yang masuk tidak sesuai dengan karcis. "Jumlah karcis dan penerimaan tidak sesuai. Terjadi selisih," terangnya. Ketika hakim menanyakan ihwal masalah hingga Kadis

Edisi : Kamıs ip maret 2018
Hal : 8

Commission of the second



Sambungan ...

Kominfo Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi didudukan di kursi pesakitan, saksi Dewa Gede menyebutkan, berdasarkan laporan ada dugaan pelaporan fiktif.

Hakim menanyatakan, apakah saksi pernah menerima atau ditawari uang terkait pungutan retribusi itu, saksi menyatakan, tidak pernah menerima dana. "Saya tidak pernah menerima apapun terkait pungutan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk," tegasnya.

Ditanya prihal anggaran uang makan, saksi menyatakan tidak ada anggaran uang makan. Keterangan yang sama juga disampaikan Kadis Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana Dwi Maha Arimbawa. Dirinya mengaku pernah ditawari uang, dan langsung menolak. "Apakah saudara pernah

ditawarkan uang oleh koordinator pemungutan," tanya hakim. "Pernah, tapi kami mempertanyakan ini uang apa, dia hanya bilang seperti proses-proses dulu. Karena tidak jelas, setelah itu kami tolak," tegasnya.

Sebelumnya tim JPU mendakwa Bagus Putra Riyadi dan Darna dengan dakwaan primair dan subsidair. Hasil retribusi yang sudah dibagi-bagi itu digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Gusti Putra Riyadi selain menerima insentif Rp 9.466.875, juga menerima Rp 18.768.875, yang seharusnya menjadi hak karyawan lain.

Dari 23 penerima, kebanyakan sudah mengembalikannya. "Atas adanya bagibagi duit itu negara dirugikan Rp 429.700.000," terang Jaksa Mearthi. (can)



Saksi Hanya Tandatangan

DALAM persidangan dugaan korupsi retribusi Terminal Manuver Gilimanuk ditanyakan perihal karcis. Saksi yang dihadirkan menyam, paikan, karcis yang keluar tidak sesuai uang yang masuk.

Lalu kemana larinya uang itu? Para saksi menyebut tidak tahu. Pun saat disinggung uang itu dibagi-bagi ke siapa, para saksi mengaku tidak tahu.

Saksi I Wayan Arsana mengatakan, uang retribusi itu disetorkan langsung (terdakwa Darna). Terkait laporan penyetoran, pembantu bendahara melaporkan langsung ke kepala dinas.

Ditanya hakim, apa pernah menerima, saksi Arsana menyatakan tidak pernah menerima. "Saya hanya tandatangan saja, saya tidak menerima," ungkapnya. (can)

Edisi : Komir ils maret 2018
Hal : 8